



Penguatan Tata Kelola Kelembagaan dan Profesionalisme Badan Usaha Milik Desa dalam Pengelolaan Air Bersih HIPPAM di Desa Kemiri, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember

Strengthening Institutional Governance and Professionalism of Village-Owned Enterprises in Managing Community-Based Clean Water (HIPPAM) in Kemiri Village, Panti Subdistrict, Jember Regency

Rohim^{1*}, Ahmat Aftoni²

¹⁻²Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pembangunan, Indonesia

*Penulis Korespondensi: rohim.annida86@gmail.com

Riwayat Artikel:

Naskah Masuk: 18 April 2026;

Revisi: 20 Mei 2026;

Diterima: 25 Juni 2026;

Terbit: 13 Juli 2026

Keywords: Clean Water; HIPPAM; Institutional Governance; Professionalism; Rural Community Empowerment.

Abstract: Access to clean water remains a persistent challenge in rural Indonesia, particularly in villages where municipal water utility coverage is limited. In Kemiri Village, Panti Subdistrict, Jember Regency, community-based clean water management is carried out through the Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM), whose integration into the Village-Owned Enterprise (BUMDes) is mandated by Government Regulation No. 11 of 2021. However, HIPPAM in Kemiri Village still operates with an unclear organisational structure, weak financial administration, and limited managerial capacity. This community service program aimed to strengthen institutional governance and professionalism in HIPPAM management through a participatory approach involving the village government, BUMDes management, and HIPPAM administrators. Activities were implemented in three stages: preparation (coordination and situational assessment), implementation (socialization, drafting of governance documents, and training), and monitoring and evaluation. Results show improvements in organizational structure clarity, the availability of foundational governance documents (Articles of Association and service Standard Operating Procedures), and greater awareness among administrators of transparent financial reporting. The program contributes to strengthening village-based public services and supports the achievement of Sustainable Development Goal 6 on clean water and sanitation.

Abstrak

Akses terhadap air bersih masih menjadi tantangan mendasar bagi masyarakat perdesaan di Indonesia, terutama di desa-desa yang belum terjangkau layanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Di Desa Kemiri, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, pengelolaan air bersih berbasis masyarakat dilakukan melalui Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM) yang integrasinya ke dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021. Namun demikian, HIPPAM di Desa Kemiri masih dikelola dengan struktur organisasi yang belum tertata, administrasi keuangan yang sederhana, dan kapasitas pengelola yang terbatas. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memperkuat tata kelola kelembagaan dan profesionalisme pengelolaan HIPPAM melalui pendekatan aksi partisipatif yang melibatkan pemerintah desa, pengurus BUMDes, dan pengelola HIPPAM. Kegiatan dilaksanakan dalam tiga tahap, yaitu persiapan (koordinasi dan asesmen kondisi eksisting), pelaksanaan (sosialisasi, penyusunan dokumen tata kelola, dan pendampingan administrasi), serta monitoring dan evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan adanya perbaikan kejelasan struktur organisasi, tersedianya dokumen tata kelola dasar berupa Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Standar Operasional Prosedur pelayanan, serta meningkatnya kesadaran pengelola terhadap pentingnya pelaporan keuangan yang transparan. Kegiatan ini berkontribusi pada penguatan pelayanan publik berbasis desa dan mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) nomor 6 tentang air bersih dan sanitasi.

Kata Kunci: Air Bersih; HIPPAM; Pemberdayaan Masyarakat Desa; Profesionalisme; Tata Kelola Kelembagaan.

1. PENDAHULUAN

Air bersih merupakan kebutuhan dasar manusia yang keberadaannya dijamin oleh negara sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Ketersediaan air bersih tidak hanya berkaitan dengan aspek kesehatan masyarakat, tetapi juga menjadi salah satu indikator kesejahteraan dan pilar penting dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), khususnya tujuan keenam tentang ketersediaan air bersih dan sanitasi yang layak bagi semua.

Data Badan Pusat Statistik (2024) menunjukkan bahwa proporsi rumah tangga di Indonesia dengan akses sumber air minum bersih mencapai 78,72 persen, namun kesenjangan antara wilayah perkotaan (85,26%) dan perdesaan (69,43%) masih signifikan. Terbatasnya jangkauan pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di wilayah perdesaan mendorong berkembangnya sistem penyediaan air minum berbasis masyarakat melalui Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM), yang di berbagai daerah lain telah menjadi fokus program pemberdayaan serupa (Hardaningrum et al., 2020).

Desa Kemiri, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, memiliki topografi dataran tinggi berbukit yang menyebabkan masyarakat sangat bergantung pada sumber mata air lokal yang dikelola HIPPAM untuk kebutuhan minum, memasak, MCK, dan pertanian. Namun demikian, pengelolaan HIPPAM di desa ini masih menghadapi persoalan kelembagaan mendasar, yaitu struktur organisasi yang belum tertata, sistem administrasi dan keuangan yang masih sederhana, serta kapasitas sumber daya manusia pengelola yang terbatas, kondisi yang sejalan dengan temuan riset kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di kecamatan yang sama, yang mengidentifikasi lemahnya tata kelola formal sebagai kendala utama optimalisasi unit usaha desa (Bahri & Rohim, 2020).

Secara nasional, dari 65.941 BUMDes yang tercatat per pertengahan tahun 2024, hanya sekitar 75,8 persen yang aktif menjalankan usaha, sementara sisanya berdiri tanpa aktivitas produktif yang menggerakkan perekonomian desa. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa memberikan landasan hukum bagi integrasi HIPPAM sebagai unit usaha pelayanan jasa BUMDes, namun keberhasilan integrasi tersebut sangat bergantung pada penguatan tata kelola dan profesionalisme pengelola di tingkat desa (Rifandini, 2022).

Pengalaman di berbagai daerah menunjukkan bahwa pengelolaan air bersih berbasis BUMDes yang dijalankan secara profesional mampu memberikan kontribusi ekonomi signifikan bagi desa (Magdalena et al., 2024), sementara pengelolaan yang tidak tertata berpotensi memicu konflik sosial antarwarga terkait distribusi air yang tidak merata. Riset

terdahulu tentang BUMDes di wilayah Jember juga menunjukkan bahwa dominasi elit desa dan lemahnya kelembagaan formal menjadi kendala utama pengembangan unit usaha desa (Bahri & Rohim, 2020; Asmuni et al., 2020), sehingga penguatan kelembagaan menjadi prasyarat penting sebelum unit usaha air bersih dapat dikembangkan secara berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang untuk memperkuat tata kelola kelembagaan dan profesionalisme BUMDes dalam pengelolaan HIPPAM di Desa Kemiri, meliputi penataan struktur organisasi, penyusunan dokumen tata kelola, penguatan sistem administrasi keuangan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola. Kegiatan ini merupakan wujud implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam mendukung pelayanan publik berbasis desa yang profesional dan berkelanjutan.

2. METODE

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Desa Kemiri, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember dengan khalayak sasaran langsung berupa pengurus dan pengelola BUMDes (Direktur, Sekretaris, Bendahara, dan unit-unit usaha) serta pengurus dan pengelola HIPPAM (Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan petugas teknis lapangan).

Sasaran tidak langsung meliputi Pemerintah Desa Kemiri dan masyarakat pengguna layanan air bersih. Kegiatan dilaksanakan melalui pendekatan aksi partisipatif yang melibatkan subjek dampingan secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, dengan tahapan sebagai berikut.

Tahap Persiapan

Tahap ini meliputi koordinasi dengan Pemerintah Desa Kemiri, pengurus BUMDes, dan pengurus HIPPAM untuk menyamakan persepsi dan membangun komitmen bersama; pengumpulan data dan informasi terkait kondisi eksisting pengelolaan HIPPAM melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi; serta penyusunan rencana kerja terperinci, termasuk penjadwalan kegiatan, penentuan narasumber, dan persiapan materi pendampingan.

Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan diawali dengan sosialisasi mengenai pentingnya kualitas pelayanan bagi pengelola HIPPAM dan kewajiban integrasi kelembagaan ke dalam struktur BUMDes. Selanjutnya dilakukan pendampingan penyusunan dokumen tata kelola berupa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), serta penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan HIPPAM yang mencakup prosedur pendaftaran pelanggan, pencatatan meter, penagihan, penanganan keluhan, dan pemeliharaan jaringan perpipaan. Pendampingan juga diberikan pada penataan sistem administrasi dan pencatatan keuangan

sederhana sebagai dasar pelaporan yang transparan.

Tahap Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dilakukan secara berkala melalui komunikasi rutin dengan pengelola HIPPAM untuk memastikan pelaksanaan sesuai rencana. Evaluasi dilakukan bersama pengelola dan didukung penjangkaran umpan balik dari masyarakat pengguna layanan terkait kualitas pelayanan air bersih yang diterima, sebagai dasar penyempurnaan tata kelola pada tahap selanjutnya.

3. HASIL

Pelaksanaan kegiatan pengabdian menghasilkan sejumlah capaian yang sejalan dengan tahapan yang direncanakan. Pada tahap sosialisasi, seluruh pengurus HIPPAM dan perwakilan BUMDes menghadiri kegiatan penguatan pemahaman mengenai pentingnya kualitas pelayanan air bersih serta kewajiban integrasi kelembagaan HIPPAM ke dalam struktur BUMDes sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021. Dari aspek kelembagaan, melalui proses pendampingan disusun struktur organisasi HIPPAM yang terintegrasi dengan struktur BUMDes, dengan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab antarorgan (pelaksana operasional, penasihat, dan pengawas) yang lebih jelas dibandingkan dengan kondisi sebelumnya yang bersifat informal dan berbasis ketokohan warga. Dari aspek regulasi internal, tim pengabdian bersama pengurus berhasil menyusun draf Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) HIPPAM serta SOP pelayanan yang mencakup prosedur pendaftaran pelanggan, pencatatan meter, penagihan, penanganan keluhan, dan pemeliharaan jaringan perpipaan. Dokumen-dokumen ini menjadi acuan operasional yang sebelumnya belum tersedia secara formal. Dari aspek administrasi dan keuangan, pengelola HIPPAM mendapatkan pendampingan penyusunan format pencatatan iuran dan pengeluaran secara sederhana sebagai langkah awal menuju sistem pembukuan yang lebih tertib, sebagai dasar bagi pelaporan yang transparan dan akuntabel kepada masyarakat pengguna dibandingkan dengan praktik pencatatan sebelumnya yang belum berjalan secara periodik. Dari aspek sumber daya manusia, evaluasi partisipatif pascakegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman pengurus terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang baik, khususnya pada aspek transparansi dan akuntabilitas. Meskipun demikian, keterbatasan waktu pengurus yang sebagian besar juga bekerja di sektor lain serta literasi digital yang masih rendah, menjadi tantangan yang memerlukan pendampingan lanjutan agar penguatan kapasitas berjalan secara berkelanjutan.

Tabel 1. Capaian Kegiatan Berdasarkan Tahapan Pelaksanaan.

Tahapan	Aktivitas	Capaian
Persiapan	Koordinasi lintas pihak dan asesmen kondisi eksisting HIPPAM	Kesepahaman dan komitmen bersama Pemdes, BUMDes, dan HIPPAM
Pelaksanaan	Sosialisasi, penyusunan AD/ART dan SOP, pendampingan administrasi-keuangan	Struktur organisasi terintegrasi, dokumen tata kelola dasar, format pencatatan keuangan
Monitoring dan Evaluasi	Komunikasi berkala dan penjangkaran umpan balik pengguna layanan	Rekomendasi perbaikan pelayanan untuk pendampingan lanjutan

4. DISKUSI

Temuan kegiatan ini memperkuat pandangan bahwa penguatan tata kelola HIPPAM perlu berpijak pada prinsip-prinsip good governance sebagaimana dirumuskan United Nations Development Programme (1997), khususnya partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Penyusunan AD/ART dan SOP dalam kegiatan ini merupakan langkah awal formalisasi kelembagaan yang sejalan dengan gagasan tersebut, sekaligus merespons kondisi sebelumnya di mana pengambilan keputusan masih sangat bergantung pada figur individu tertentu.

Dari perspektif teori kelembagaan (North, 1990), lemahnya aturan main formal pada HIPPAM sebelum kegiatan pengabdian menjadi sumber ketidakpastian pelayanan, misalnya penetapan iuran yang tidak konsisten dan mekanisme pertanggungjawaban yang tidak jelas. Penyusunan dokumen formal AD/ART dan SOP dalam kegiatan ini berfungsi mengurangi ketidakpastian tersebut, sejalan dengan temuan Rifandini (2022) yang menekankan pentingnya harmonisasi kelembagaan formal desa dengan norma informal lokal dalam tata kelola air bersih perdesaan agar kewenangan pengelola benar-benar berjalan efektif.

Sebagai organisasi quasi non-profit, BUMDes dengan unit usaha HIPPAM dihadapkan pada tujuan ganda antara misi sosial dan keberlanjutan finansial (Rainey, 2009). Pendampingan penyusunan sistem administrasi keuangan sederhana dalam kegiatan ini menjadi langkah awal menuju keseimbangan tersebut. Pendekatan partisipatif yang digunakan juga sejalan dengan konsep pemberdayaan masyarakat (Ife et al., 2008), di mana pengelola HIPPAM tidak diposisikan sebagai objek pendampingan semata, melainkan subjek aktif dalam proses penataan kelembagaan mereka sendiri. Penyusunan SOP pelayanan yang mencakup dimensi keandalan, daya tanggap, dan jaminan turut merujuk pada kerangka kualitas pelayanan Parasuraman et al., (1988), yang relevan diterapkan untuk memperbaiki pengalaman masyarakat pengguna air bersih di Desa Kemiri, terutama dalam hal kecepatan penanganan keluhan dan kejelasan prosedur pendaftaran pelanggan.

Temuan ini konsisten dengan sejumlah kegiatan pengabdian serupa pada unit usaha BUMDes di daerah lain, misalnya pelatihan penguatan tata kelola BUMDes berbasis karakter dan potensi masyarakat di Konawe Selatan (Moita, 2022), pendampingan pengelola BUMDes dalam mengidentifikasi potensi dan permasalahan bisnis di Lombok Tengah (Suparman et al., 2023), serta pelatihan manajemen strategis dan optimalisasi tata kelola BUMDes dan pendampingan pengelolaan kualitas air bersih berbasis masyarakat di Kediri (Susanto et al., 2024), yang sama-sama menunjukkan bahwa pendampingan tata kelola berkontribusi pada peningkatan profesionalisme pengurus unit usaha desa.

Hasil ini juga memperkuat kajian sebelumnya di Kabupaten Jember mengenai pentingnya penguatan kelembagaan desa untuk mendukung fungsi ekonomi dan pelayanan BUMDes (Rohim, et., 2023; Sukarman & Rohim, 2022), termasuk urgensi keterlibatan perempuan dalam struktur pengelolaan unit usaha desa Rohim et al., (2021). Konsistensi temuan lintas lokasi ini menegaskan bahwa penguatan tata kelola kelembagaan merupakan prasyarat mendasar sebelum unit usaha BUMDes, termasuk pengelolaan air bersih, dapat berkembang secara profesional dan berkelanjutan.

Untuk menjamin keberlanjutan program, capaian kegiatan ini perlu dipantau melalui indikator kinerja yang komprehensif, mencakup aspek keuangan, pelayanan pelanggan, proses internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan organisasi sebagaimana kerangka *Balanced Scorecard* (Kaplan & Norton, 2005) sehingga penguatan kelembagaan HIPPAM tidak berhenti pada tahap formalisasi dokumen, tetapi berlanjut pada peningkatan kinerja layanan secara nyata dan terukur.

5. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berhasil memperkuat tata kelola kelembagaan dan profesionalisme BUMDes dalam pengelolaan HIPPAM di Desa Kemiri, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember melalui penataan struktur organisasi, penyusunan dokumen AD/ART dan SOP pelayanan, serta pendampingan sistem administrasi keuangan sederhana. Perubahan yang dihasilkan bersifat awal dan memerlukan pendampingan berkelanjutan agar prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi benar-benar melembaga dalam praktik keseharian pengelola. Pendampingan lanjutan dan monitoring berkala direkomendasikan untuk memastikan keberlanjutan reformasi kelembagaan ini serta kontribusinya terhadap peningkatan kualitas pelayanan air bersih, Pendapatan Asli Desa, dan kesejahteraan masyarakat Desa Kemiri.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pelaksana mengucapkan terima kasih kepada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pembangunan, Pemerintah Desa Kemiri, pengurus Badan Usaha Milik Desa dan HIPAM, serta seluruh pihak yang telah mendukung terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

DAFTAR REFERENSI

- Asmuni, A., Rohim, R., & Trihartono, A. (2020). Minimizing brain drain: How BumDes holds the best resources in the villages. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 485(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/485/1/012011>
- Bahri, M. S., & Rohim, R. (2020). Dominasi elit desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Desa Kemuningsari Lor Kecamatan Panti Kabupaten Jember. *Majalah Ilmiah Cahaya Ilmu*, 2(2), 81–95.
- Hardaningrum, F., Kristiana, W. A., & Wulandari, A. (2020). Pemberdayaan masyarakat Himpunan Penduduk Pengguna Air Minum (HIPAM) di Desa Balongdowo dan Desa Putat, Sidoarjo, Jawa Timur. *Jurnal Layanan Masyarakat (Journal of Public Services)*, 3(2), 72.
- Ife, J., Tesoriero, F., Qudsy, S. Z., Manulang, S., Yakin, N., & Nursyahid, M. (2008). *Community development: Alternatif pengembangan masyarakat di era globalisasi*. Pustaka Pelajar.
- Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (2005). The balanced scorecard: Measures that drive performance. *Harvard Business Review*, 70, 1–10.
- Magdalena, D., Syaeba, M., & Fitrah, N. (2024). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai ekonomi desa di Desa Tawalian Timur Kecamatan Tawalian Kabupaten Mamasa (Studi kasus pengelolaan air bersih). *Journal Peqquruang: Conference Series*, 6(1), 180–185.
- Moita, S. (2022). Pelatihan penguatan tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berbasis karakter dan potensi masyarakat di Desa Pombulaa Jaya Kecamatan Konda. *Jurnal Abdidas*. <https://ipv6.abdidas.org/index.php/abdidas/article/view/703>
- North, D. C. (1990). *Institutions, institutional change and economic performance*. Cambridge University Press.
- Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. (1988). SERVQUAL: A multiple-item scale for measuring consumer perceptions of service quality. *Journal of Retailing*, 64(1), 12–40.
- Rainey, H. G. (2009). *Understanding and managing public organizations*. John Wiley & Sons.
- Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air*.
- Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa*. Database Peraturan. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161841/pp-no-11-tahun-2021>
- Rifandini, R. (2022). Kebijakan inovatif tata kelola air bersih desa melalui dinamika tipologi kelembagaan. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 6(2), 83–94.

- Rohim, R., Asmuni, A., & Muttaqin, M. Z. (2021). Multi-sector collaboration: Success stories of tourism village development. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik*.
- Rohim, R., Sunarto, I., & Lutvi, M. (2023). Development from the periphery: Village-owned enterprises, women's empowerment, and information technology. *13*(2), 927–938.
- Sukarman, S., & Rohim, R. (2022). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember. *Majalah Ilmiah Cahaya Ilmu*, *4*(1), 27–40.
- Suparman, L., Sagir, J., Nasir, M., & Bagis, A. A. (2023). Pendampingan pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Lombok Tengah dalam mengidentifikasi potensi sumber daya dan permasalahan bisnis. *Jurnal Pepadu*, *4*(2), 246–253.
- Susanto, S., Pradigta, M. D. I., Winarto, S., & Azhari, F. M. (2024). Pendampingan kegiatan pengelolaan kualitas air bersih dalam program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat di Desa Sidomulyo, Kediri. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, *5*(2), 1833–1840.